
BULETIN

BAPPEDA PROVINSI PAPUA



2 TAHUN KEPEMIMPINAN LUKMEN

#Edisi 2 Tahun 2020



BULETIN BAPPEDA PROVINSI PAPUA

PENGANTAR REDAKSI

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya sehingga kami telah berhasil menyusun dan menerbitkan Buletin Bappeda Provinsi Papua Edisi 2 Tahun 2020 dengan baik dan lancar.

Tujuan dari hadirnya buletin ini adalah untuk mempublikasikan data dan informasi terkait kinerja Bappeda Provinsi Papua. Harapan kami, masyarakat luas akan dapat memperoleh manfaat tambahan tentang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua, yang menjadikan data sebagai bahan acuan/dasar arah kebijakan.

>>

Kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan buletin ini sehingga kami berharap adanya masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin, red.

REDAKSI

Penanggung Jawab

Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si

Pemimpin Redaksi

Adolof Kambuaya, SH., M.Si

Sekretaris Redaksi

Andry, SIP., M.Si

Redaktur Pelaksana

Dr. Bintang Yuliana, SE., MM
Merlin Hamadi, SE., M.Si
Syafrudin Mukhtar

Peliput Berita

Ir. Iriawan Surya, MBA., MM
Frelyno Gaspersz, SE
Donny O.A. Renmaur, S.STP
Novita Mramra, SE
Elisabeth Lumingkewas
Mikha Bukorpioper
Yusran

DAFTAR ISI

- 1 Bimtek Pengelolaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Keerom
- 2 Covid-19, Sampai Kapan?
- 5 Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Bappeda Prov. Papua
- 6 Melihat 2 Tahun Kepemimpinan LUKMEN
- 9 *Workshop Model Pembangunan Rendah Karbon*
- 10 *Kick Off 362 Hari PON XX Papua Tahun 2021*
- 12 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan: RKPD
- 14 Rakor Online SIPD Provinsi Papua
- 16 Webinar Forum KTI: Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
- 17 *Work From Home, Budaya Kerja Baru PNS*
- 19 Serba Serbi

Editor

Zeth F. Waroy, SE
M. Harrys Usman, S.Kom
Novi Agaki, S.S

Layout & Desain

Yaniu Misdianto, S.Kom
Indra Rukmana, S.Kom

Administrasi

Yune N. Yonathan, SE
Ayu Indriyani, S.KM
Yuliana, Amd. Keb

BIMBINGAN TEKNIS

PENGELOLAAN DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEEROM



JAYAPURA – Bappeda Kabupaten Keerom mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Papua. Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat UPTB Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua pada 5 - 6 November 2020 ini bertujuan agar ASN Bappeda Keerom dapat meningkatkan kemampuan mengelola data dalam rangka perencanaan pembangunan di daerahnya. Bimtek secara langsung dibuka oleh Kepala UPTB Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua, Andry, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Sementara itu, narasumber lainnya adalah Kepala Seksi Data dan Analisa Pembangunan, Merlyn Hamadi. Hadir sebagai peserta adalah PNS Bappeda Kabupaten Keerom serta PNS Dinas Informasi dan Komunikasi sebanyak 7 orang.

“Perencanaan pembangunan itu didasarkan pada data dan informasi, sehingga ketersediaan data menjadi sangat penting dalam menentukan arah

pembangunan ke depan dan data sebagai indikator dalam sistem informasi pembangunan” tutur Andry dalam pemaparan materinya. Data dan informasi tersebut mencakup kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada kesempatan yang sama, Merlyn menjelaskan tentang pentingnya forum data dan informasi pembangunan dalam mewujudkan Papua *Integrated* Satu Data untuk memenuhi kebutuhan data berkualitas sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah. “Tantangan kita saat ini adalah ketersediaan data perencanaan pembangunan yang tersebar di instansi sektoral sehingga sulit diakses secara cepat dan kesenjangan data atau terbatasnya dukungan data informasi yang lengkap, valid dan update untuk mendukung perencanaan pembangunan” lanjutnya. (*) (DR)



COVID-19, SAMPAI KAPAN?

JAYAPURA - Pandemi covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya virus corona (Covid-19) ke seluruh dunia. Virus covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 9 Maret 2020. Sampai dengan 19 Desember 2020, terdapat 222 negara terkonfirmasi telah mengalami pandemi covid-19 dengan total jumlah positif terpapar sebanyak 74.299.042 orang dan jumlah yang meninggal sebanyak 1.669.982 orang (sumber: <https://covid19.go.id>).

Kasus positif covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar. Sampai 19 Desember 2020, jumlah positif terpapar sebanyak 657.948 orang, jumlah yang meninggal sebanyak 19.659 orang dan jumlah yang sembuh sebanyak 536.260 orang (sumber: <https://covid19.go.id>).

Pada Maret 2020, ditemukan kasus positif pertama di Provinsi Papua. Hal ini langsung mendapat respon cepat oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan mengadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan semua

Bupati/Walikota, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di Provinsi Papua, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh stakeholder. Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Papua ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah preventif terkait penanganan penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Papua. Adapun hasil dari pertemuan ini adalah tindakan pembatasan akses transportasi keluar dan masuk Provinsi Papua. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebarluasan virus ini, dengan memprioritaskan wilayah adat La Pago dan Mee Pago karena keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. *Tracing* dilakukan oleh tim Kesehatan untuk sesegera mungkin menemukan kasus agar dapat menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini.

Pertemuan selanjutnya rutin dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali untuk mengevaluasi kinerja Tim Satgas dalam penanganan dan perkembangan penyebaran covid-19 di setiap Kabupaten/Kota. Hasil dari pertemuan ini tertuang secara legal dalam bentuk Surat Edaran dan Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh seluruh peserta. Hingga bulan September 2020 telah dilakukan 10 kali pertemuan bersama untuk merumuskan kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua dalam menerapkan kebijakan pencegahan covid-19 telah mampu menekan laju penyebaran virus tersebut. Namun perlu diakui bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah. Hingga 25 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 5.687 orang,

dengan 1.841 orang dirawat (32,4%), 3.765 orang sembuh (66,2%) dan 81 orang meninggal (1,4%). Sedangkan terdapat 51 orang *probable*, 1.857 orang kontak erat dan 371 orang suspek. Kalau dikaji lebih dalam lagi, maka proporsi kasus covid-19 berdasarkan umur dan jenis kelamin terdapat 57,3% menginfeksi laki-laki dan 42,7% menginfeksi perempuan. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak terinfeksi adalah usia produktif (15-58 tahun) sebanyak 86,04% dan apabila melihat proporsi berdasarkan Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP, maka jumlah kasus paling banyak menginfeksi 84% Non OAP dan 16% OAP. Salah satu acuan Pemerintah Papua dalam menentukan kebijakan adalah dengan melihat angka reproduksi (R_t). Per 25 September 2020, angka R_t mencapai 2,3. Ini berarti bahwa setiap kasus menginfeksi setidaknya 2 (dua) orang lainnya. Selain itu, angka R_t tersebut juga menunjukkan bahwa situasi covid-19 di Provinsi Papua masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya karena untuk dapat dikatakan terkendali maka Pemerintah Provinsi Papua harus dapat menekan angka R_t dibawah angka 1 (Sumber: Satgas Covid Papua).

Pemerintah Provinsi Papua dalam menganalisis perkembangan covid-19 menggunakan pendekatan kewilayahan sehingga resiko penularan dapat dipetakan dari klasifikasi tinggi ke klasifikasi rendah pada setiap Kabupaten/Kota. Untuk situasi di Provinsi Papua sendiri terdapat 6 Kabupaten/Kota yang menjadi episentrum yaitu Kota Jayapura (R_t 1,57), Mimika (0,61), Jayapura (0,24), Biak Numfor (0,12), Keerom (0,05) dan Nabire (0,05), dengan fokus kepada pencegahan dan penanganan di episentrum ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penularan di Provinsi Papua (Satgas Covid Papua).



Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten/Kota adalah memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kasus positif dan semaksimal mungkin memberikan bantuan atau perhatian berupa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua juga melalui Satgas Covid-19 Provinsi Papua rutin melakukan pengecekan penerapan kebijakan langsung di daerah episentrum sehingga dapat langsung menampung kendala yang dihadapi oleh daerah dalam rangka perumusan kebijakan selanjutnya.

Strategi Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadapi bencana non alam ini, yaitu penguatan sistem kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, dan perlindungan sosial. Strategi ini kemudian dijabarkan dalam sepuluh kebijakan besar, yaitu pembatasan pergerakan orang dan kendaraan, penguatan kegiatan *surveilans*, penguatan sistem penanganan covid-19, menjamin keberlanjutan kegiatan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberian insentif untuk UMKM, memperketat ketahanan pangan, relaksasi pajak kendaraan, bantuan sosial non tunai/bahan pangan dan bantuan sosial tunai.

Pemerintah Provinsi Papua berharap agar seluruh masyarakat dapat disiplin dalam penerapan pencegahan covid-19, seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman dan berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh.

Sejauh ini vaksin covid-19 sudah ditemukan namun belum dapat didistribusikan kepada masyarakat. Entah kapan pandemi ini akan berakhir. Segala daya upaya telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengontrol penyebaran kasus covid-19 ini. Selain itu menjadi sangat penting, peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan untuk saling mengingatkan dan memutus mata rantai penularan, terus menerus mengikuti perkembangan covid-19 di Provinsi Papua, melakukan pemeriksaan PCR/SWAB untuk mengetahui status kesehatan, melapor diri apabila mengalami ciri-ciri gangguan kesehatan yang disebabkan oleh covid-19 dan isolasi mandiri ketika dinyatakan terinfeksi.

Pada akhirnya, kita harus tetap optimis bahwa situasi pandemi covid-19 ini pasti akan berakhir dan kita harus bersama-sama menghadapi perubahan dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama mendoakan agar situasi ini cepat berakhir. Tuhan memberkati kita semua. (*) (DR)



SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA



Saya berharap agar Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang telah dilantik dapat bekerja secara maksimal dengan mengutamakan koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan. Kemudian hal lain yang menjadi prioritas adalah peningkatan penyerapan anggaran pada masing-masing bidang sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

Yohanes Walilo

JAYAPURA - Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, memimpin kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Papua pada Senin, 19 November 2020.

Pada Sertijab kali ini, ada 8 Pejabat Eselon III dan 24 Pejabat Eselon IV, yang telah dilantik secara virtual oleh Wakil Gubernur Papua pada 28 November 2020, yang melakukan Sertijab. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, dalam arahnya ketika melakukan pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menghimbau agar Papua harus dapat menjadi saluran berkat dan itulah tugas pejabat yang baru dilantik, sebab yang menentukan dinas maju atau tidak adalah Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Kegiatan Sertijab ini diakhiri dengan proses penandatanganan oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua selaku pimpinan SKPD dan Sekretaris Bappeda Provinsi Papua selaku perwakilan dari Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang telah dilantik. (*) (DR)

MELIHAT 2 TAHUN KEPEMIMPINAN LUKMEN

JAYAPURA - Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 5 September 2018, Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah merealisasikan beberapa janjinya sesuai dengan visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan”. Diawali dengan konsolidasi yang dilakukan secara intens dengan Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya. Dilakukan pula pertemuan dengan Presiden RI serta road show ke Kementerian/Lembaga guna memastikan komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat dapat berjalan dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas antara aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua sehingga dapat berlangsung secara efektif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Papua telah mengalami peningkatan. Jika IPM Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 60,06 maka pada tahun 2019 meningkat menjadi 60,84 (sumber: <https://papua.bps.go.id>). Semakin membaiknya IPM Provinsi Papua dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kualitas fisik (angka harapan hidup) serta kualitas non fisik (rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf).

Dibidang kesehatan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur guna memastikan pelayanan dasar kesehatan bagi penduduk di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.



Angka harapan hidup sebagai cerminan dari kualitas fisik menunjukkan adanya peningkatan. Jika pada tahun 2018 masih sebesar 65,36 tahun maka tahun 2019 sudah sebesar 65,65 tahun (sumber: <https://papua.bps.go.id>). Terjadinya peningkatan ini mengindikasikan bahwa tingkat kualitas hidup penduduk Provinsi Papua yang semakin membaik.

Sejalan dengan kualitas fisik maka kualitas non fisik yang tercermin dari rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf pun mengalami peningkatan. Jika rata-rata lama sekolah Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 6,52 maka tahun 2019 sudah sebesar 6,65. Selanjutnya, jika angka melek huruf Provinsi Papua (penduduk berusia lebih dari 15 tahun) pada tahun 2018 sebesar 76,79 persen maka tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 78 persen (sumber: <https://papua.bps.go.id>).

Selain itu, jumlah olahragawan berprestasi yang semakin meningkat juga merupakan bukti yang tidak dapat diremehkan. Jika jumlah olahragawan berprestasi tahun 2018 sebesar 500 orang maka meningkat menjadi 650 orang pada tahun 2020 (sumber: Disorda Provinsi Papua). Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat membanggakan mengingat Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XX 2021.

Terkait dengan rasa aman, tenteram dan damai, maka dapat terlihat dari menurunnya angka kriminalitas (per 100.000 penduduk). Angka kriminalitas Provinsi Papua tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,19 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Angka kriminalitas pada tahun 2018 sebesar 71,53 dan tahun 2019 sebesar 60,34 (sumber: Polda Papua). Sementara rasio kriminalitas yang ditangani mengalami peningkatan sebesar 16,4. Jika tahun 2018 masih sebesar 35,48 maka tahun 2019 meningkat menjadi 50,88 (sumber: Polda Papua). Selanjutnya, indeks demokrasi mengalami peningkatan sebesar 3,05 pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Indeks demokrasi tahun 2018 sebesar 62,20 dan tahun 2019 sebesar 65,25 (sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2020).

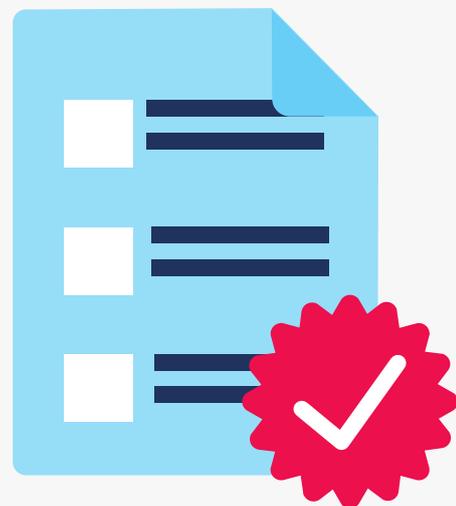
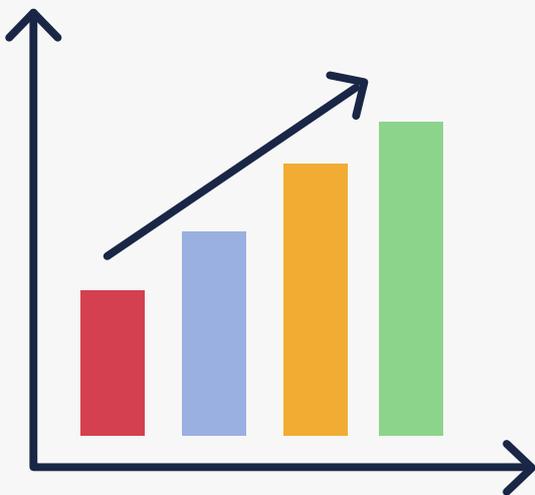
Dari segi tata kelola pemerintahan aspek perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Papua telah berhasil menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat rutin maupun dokumen perencanaan pembangunan lainnya (road map pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat).

Untuk segi tata kelola pemerintahan aspek keuangan daerah, kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Provinsi Papua terhadap pendapatan daerah tahun 2018 sebesar 7,82 persen dan kemudian meningkat tahun 2019 menjadi sebesar 12,75 persen (sumber: BPKAD Provinsi Papua). Dengan adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Papua maka diharapkan Pemerintah Provinsi Papua semakin mampu membiayai keuangannya, terutama dalam membiayai pelayanan kepada

masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua telah mampu mempertahankan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kategori baik. Hal ini tentunya tidak mudah sehingga berbagai upaya dilakukan guna memastikan aspek ini dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait ketenagakerjaan di Provinsi Papua, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebesar 1.830.409 orang sementara penduduk yang bekerja hanya sebesar 1.764.113 orang. Ini berarti bahwa masih terdapat 66.296 orang yang menganggur. Kenaikan terbesar persentase pekerja terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, konstruksi sebesar 1,39 persen pada periode Februari 2019 sampai Februari 2020. Sedangkan penurunan terbesar persentase pekerja terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,42 persen. Sementara itu, pengangguran paling tinggi terjadi pada angkatan kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 10,19 persen jika dibandingkan dengan angka pengangguran di tingkat pendidikan lainnya (sumber: <https://papua.bps.go.id>).



Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada Maret 2019 sebesar 27,53 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,98 persen pada September 2019 sehingga persentase penduduk miskin di Papua pada September 2019 sebesar 26,55 persen. Walaupun secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Papua mengalami penurunan namun untuk daerah perkotaan justru meningkat dari 4,26 persen pada Maret 2019 menjadi 4,53 persen pada September 2019. Sedangkan untuk pedesaan mengalami penurunan dari 36,84 persen pada Maret 2019 menjadi 35,36 persen pada September 2019 (sumber: <https://papua.bps.go.id>).

Akhirnya, walaupun kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal selama dua tahun ini telah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sisa waktu kepemimpinan guna mewujudkan "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan". (*) (BY-IS)

WORKSHOP MODEL PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

JAYAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua menggelar kegiatan Workshop pengenalan model pembangunan berbasis sistem dalam menyusun rencana sektoral pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua pada Kamis, 22 Oktober 2020, bertempat di Swiss-Belhotel Jayapura.

Workshop ini diawali dengan sambutan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Papua, Yulien Weya, mewakili Gubernur Papua. Turut hadir pula perwakilan dari SKPD terkait, seperti Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta para mitra seperti CIFOR, ECONUSA dan WRI Indonesia.

"Saya berharap dari workshop ini dapat membangun suatu kemampuan dasar dari peserta dalam merencanakan dan memperkirakan konsekuensi dari upaya penurunan emisi pada berbagai macam sektor pembangunan serta terbentuknya satu pemahaman mengenai metode pengolahan data dan teknik estimasi emisi dari aktifitas emisi per sektor di Provinsi Papua" tutur Yulien.

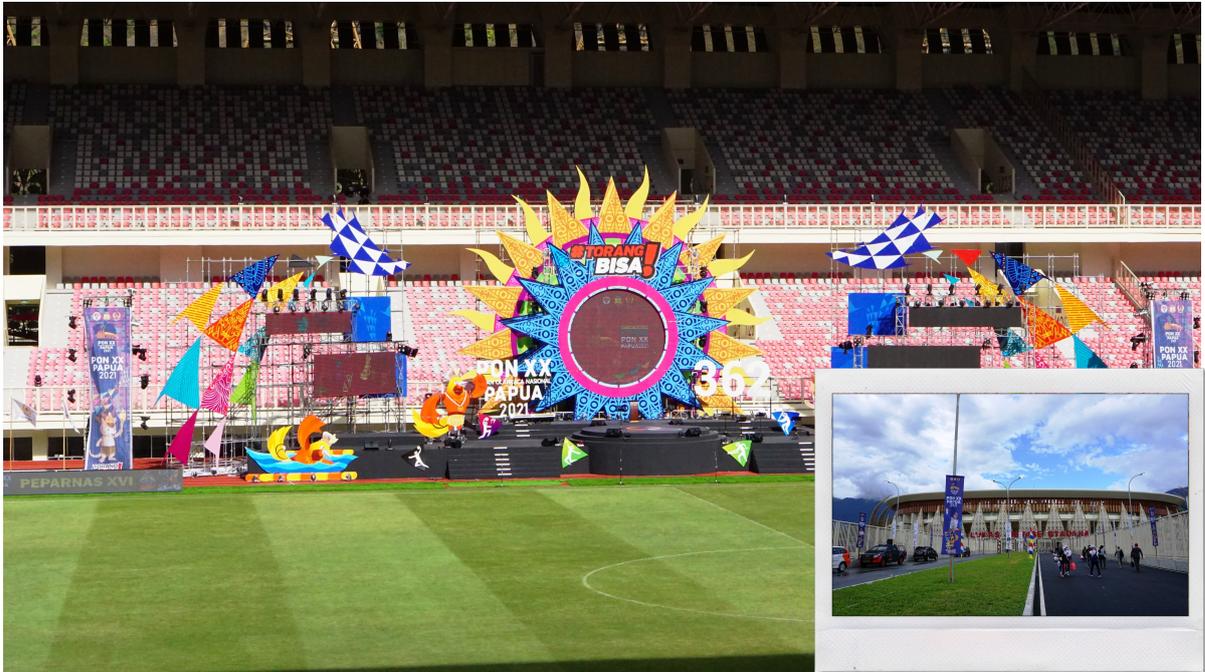
Workshop ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu penyusunan rencana kerja (*logframe*) PPRK. Tentu hal ini dapat dicapai melalui strategi perencanaan yang baik, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dapat membuka ruang keterlibatan peran publik dan swasta agar upaya pembangunan rendah karbon dapat berjalan dengan baik.

Disamping itu, melakukan pengumpulan data dan informasi sektoral serta menyusun dan merumuskan perencanaan kegiatan aksi mitigasi pada setiap sektor sebagai bahan utama penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Beberapa sektor yang dimaksud adalah sektor kehutanan, lahan gambut, pertanian, persampahan dan limbah, energi, transportasi, industri serta *blue carbon*.

Penyusunan RPRKD dilakukan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi, yang memperlihatkan hubungan timbal balik antar sektor serta memperhatikan aspek tata ruang. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan model pembangunan rendah karbon adalah sistem dinamik. Model tersebut diupayakan untuk dapat diturunkan pada tingkat Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi dapat menyusun RPRKD berbasis model sistem dinamik yang terintegrasi.

Di lain kesempatan, Kasubid Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan Bappeda Provinsi Papua, Cindy Kasenda, mengingatkan bahwa Provinsi Papua terpilih sebagai salah satu provinsi percontohan implementasi *Low Carbon Development* Indonesia (LCDI) di Indonesia sehingga perlunya perhatian khusus demi suksesnya RPRKD. "Saya berharap dengan dilakukannya workshop ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dari BUMD, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sektor swasta serta lembaga donor untuk berkontribusi pada PPRK dari level regional hingga nasional" tambahnya. (*) (DR)

KICK OFF 362 HARI PON PAPUA TAHUN 2021



JAYAPURA - Kick Off 362 hari menjelang dimulainya PON XX Papua 2021 diawali dengan agenda peresmian Stadion Utama PON yang bernama Stadion Lukas Enembe, Bandar Udara Dorthneys Hiyo Eluay yang sebelumnya bernama Bandar Udara Sentani, dan peluncuran buku data Orang Asli Papua pada Sabtu, 23 Oktober 2020. Kegiatan yang dilakukan secara virtual dengan penjagaan ketat dan juga menerapkan protokol kesehatan namun tetap dikemas dengan sangat meriah ini berlangsung secara aman dan terkendali. Diawali dengan ibadah pengucapan syukur dan diakhiri dengan hitung mundur pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung pada 2 - 15 Oktober 2021 di Provinsi Papua.

Gubernur Papua mengharapkan, dengan hadirnya *venue* olahraga yang dimiliki saat ini dapat dijadikan motivasi bagi para atlet untuk terus berjuang meraih prestasi gemilang di PON Papua nantinya.

"Membentuk sistem pembinaan melalui Pusat Latihan Provinsi (Puslatprov) sejak 2018 lalu, memberikan dukungan layanan kepada atlet dan pelatih saat menjalani pemusatan latihan terpusat. Sebab saat ini ada sebanyak 1.227 orang atlet yang mengikuti program TC terpusat yang turun pada 37 cabang olahraga, 56 disiplin, dan 579 nomor tanding. Terima kasih Bapak Gubernur Lukas Enembe yang telah membuat perubahan melalui pembangunan manusia olahraga, baik saat ini dan generasi yang akan datang. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini, bukan hanya tempat seremonial PON, namun sebagai laga final sepakbola Papua dalam meraih medali emas" kata Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya.



“

Momentum peresmian venue PON dan penamaan Stadion Lukas Enembe yang merupakan stadion terbesar kedua di Indonesia ini, termasuk hitung mundur 362 hari pelaksanaan PON XX tahun 2021 membuktikan bahwa Provinsi Papua yang ditunjuk sebagai tuan rumah telah siap menyelenggarakan event empat tahunan tersebut

Lukas Enembe

Ditambahkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Alexander Kapisa, yang menjelaskan bahwa pembangunan venue dibangun dengan menggunakan sumber dana APBN melalui Instruksi Presiden. Sedangkan ada sembilan venue yang dibiayai dengan menggunakan sumber dana APBD Provinsi, yakni GOR STT Gidi, venue menembak indoor di kawasan Stadion Lukas Enembe, venue menembak outdoor di Doyo Baru, lapangan softball/baseball di Universitas Cenderawasih dan kawasan AURI Silas Papare, GOR voli di Koya Koso, lapangan tenis di kawasan Kantor Walikota Jayapura, GOR arena futsal di Timika dan Stadion Utama Lukas Enembe. "GOR STT Gidi akan mempertandingkan cabang olahraga kempo dan muaythai dengan anggaran sebesar Rp 86 miliar lebih dan berkapasitas 5.000 penonton, menembak indoor berkapasitas 500 penonton menelan anggaran Rp 98 miliar lebih dengan ada mess atlet berkapasitas 250 tempat tidur, lapangan softball/baseball di AURI Kabupaten Jayapura berkapasitas 1.500 orang dengan anggaran Rp 159 miliar, lapangan softball/baseball di Uncen Kota Jayapura berkapasitas penonton 5.000 orang, venue voli di Koya Koso dengan anggaran Rp 357 miliar yang mempertandingkan cabang olahraga voli indoor dan pantai, sedangkan lapangan tenis di kawasan Kantor Walikota Jayapura menampung 3.000 orang dengan menelan anggaran Rp 169 miliar dan GOR Arena Futsal di Timika berkapasitas 5.000 penonton dengan anggaran Rp77 miliar", tutur Alexander. (*) (DR)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan: RKPD

JAYAPURA - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan tentang penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah dan yang disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan tahunan (RKPD) merupakan implementasi dari dokumen RPJM yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan

rakyat. RKPD adalah rencana program/ kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). RKPD sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Adapun proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan sehingga mampu mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD merupakan dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Legislatif. PPA yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dijadikan pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian menjadi penjabaran serta bahan masukan dalam penyusunan RAPBD, dan melalui proses pembahasan sidang DPRD maka ditetapkanlah menjadi APBD.



Prinsip Penyusunan RKPD



Participative; masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam prosesnya. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat adalah penerima manfaat langsung dari hasil perencanaan tersebut.

Sustainable; perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahapan saja, akan tetapi harus berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan yang terus menerus dalam kesejahteraan masyarakat, serta menjaga tidak terjadinya kemunduran. Prinsip ini juga diartikan bahwa diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat dilakukan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.



Holistic; sesuai dengan artinya "menyeluruh", maka prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur saja tetapi harus dilihat dari seluruh aspek serta dalam keutuhan suatu konsep. Selain itu, dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang, terbuka, dan demokratis.



Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme atau tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kabupaten/ Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Dengan demikian, dengan adanya konsistensi antara RKPD dan APBD dalam suatu sistem perencanaan pembangunan maka akan terwujud sinergitas antara antara perencanaan dan penganggaran guna mencapai

efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Harapannya, Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menjalankan peran dan kewenangannya masing-masing, yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. (*) (FG)

RAKOR ONLINE SIPD PROVINSI PAPUA

JAYAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Online Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 dengan tema Implementasi SIPD dan Permendagri No 90 tahun 2019. Kegiatan ini digelar di Hotel Aston Jayapura secara virtual pada Kamis, 30 September 2020 dan dibuka langsung oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Papua, Adolof Kambuaya. Adapun narasumber dalam kegiatan ini, yaitu Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Nyoto Suwignyo, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Bahri, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV Subdirektorat IV (Maluku, Papua, NTB, NTT) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Yedi Rahmat, dan Analis Perencanaan Anggaran Daerah Subdirektorat IV, Dira Ensyadewa. Turut hadir secara virtual, yaitu perwakilan dari Kabupaten/Kota dan Kemendagri RI. Selain itu, yang hadir secara langsung adalah wali data SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua dan pegawai Bappeda Provinsi Papua.





“Penyelenggaraan Rakor online ini dimaksudkan agar seluruh peserta bisa mendapatkan informasi dan regulasi terbaru demi percepatan pengembangan SIPD sehingga dapat dirumuskan suatu output sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dan informatif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota” tutur Adolof.

Salah satu amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 adalah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait pemerintahan daerah melalui informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kemudian diuraikan melalui Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini dibangun dan dikembangkan untuk menyediakan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung serta terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Papua telah menyediakan sistem informasi pembangunan berbasis elektronik, sehingga dalam proses menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RPTD serta dokumen perangkat daerah yang meliputi renstra dan RKPD.

“Kegiatan Rakor SIPD sangat baik dilakukan. Saat ini Kemendagri sudah melakukan rekap pelaksanaan penyusunan RKPD se-Indonesia, sudah masuk 427 Kabupaten/Kota dan Provinsi dan masih terdapat 73 daerah, khususnya Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikannya, termasuk Provinsi Papua. Diharapkan agar penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah bisa diselesaikan tepat waktu”, tutur Nyoto. (*) (DR)



WEBINAR FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI): ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

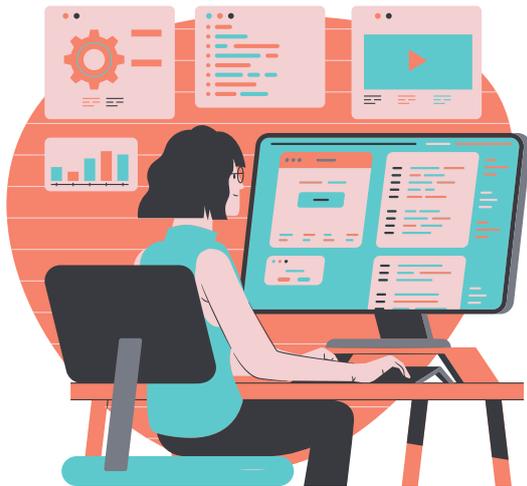
JAYAPURA - Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebuah forum untuk berbagi praktek cerdas, pengalaman dan pembangunan dari tingkat lokal untuk meningkatkan rasa kepemilikan, mengharmonisasikan dan memperbaiki pengelolaan program ke arah pembangunan nasional serta kemampuan menghadapi tantangan beradaptasi terhadap kebiasaan baru di masa pandemi covid-19. Forum KTI tahun ini dilakukan secara daring dengan tema "**Menari dengan Tabuhan Gendang Sendiri: Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Kawasan Timur Indonesia**".

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Samsul Widodo, berkesempatan menjadi *Keynote Speaker* pada Forum KTI ini. Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Ketua POKJA Forum KTI, Winarni Monoarfa, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa walaupun dalam masa pandemi covid-19 namun diharapkan agar dapat lebih meningkatkan spirit untuk tetap menginspirasi masyarakat, baik inovasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya lokal. Selain itu, hadir pula Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa, dan para pegawai Bappeda Provinsi Papua.

Sebuah cerita inspiratif pada forum ini adalah tentang penggunaan *virtual tour* sebagai salah satu cara untuk tetap dapat menikmati keindahan alam ataupun suasana berwisata selama masa pandemi covid-19. Apa itu *virtual tour*? *Virtual tour* adalah alternatif baru pengalaman perjalanan wisata ke suatu destinasi yang dilakukan melalui perantara teknologi informasi komputer dan jaringan selama masa pandemi covid-19. Walaupun tidak dapat menikmatinya secara fisik, namun kita tetap dapat berwisata, menikmati dan peduli tentang alam kita yang sangat indah. Konsep ini diinisiasi oleh Sebumi.id. Dalam kesempatan ini, pendiri Sebumi.id, Iben Yuzenho, membawakan materi tentang *virtual tour*: AKB Sektor Pariwisata yang menjelaskan bahwa tujuan sebumi.id adalah mendukung tentang konservasi dan gaya hidup berlanjut yang salah satunya berkaitan tentang ekowisata. (*) (DR)

WORK FROM HOME (WFH): BUDAYA KERJA BARU PNS

JAYAPURA - Guna mencegah penyebaran infeksi virus covid-19 yang semakin masif, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) mau tidak mau harus melakukan aktifitas Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebagai *A New Work Model*. Hal ini dilakukan guna menjaga agar PNS dapat terus produktif bekerja walaupun aktifitas kerja dilakukan dari rumah dan juga untuk menjaga *social/physical distancing*.



Bagi PNS, WFH merupakan hal yang baru. Mengapa dikatakan baru? karena mereka dituntut untuk harus tetap bekerja walaupun aktifitas kerja dilakukan dari rumah. Sementara yang terjadi sebelum adanya pandemi virus covid-19 adalah aktifitas kerja PNS dilakukan di kantor, kinerja PNS diukur dari absensi kehadirannya di kantor, penugasan dari atasan langsung, serta mempersiapkan dan mengadakan rapat secara tatap muka. Sebenarnya, wacana WFH bukanlah hal baru. Pada 8 Agustus 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mewacanakan Flexible Working Arrangement yang akan diterapkan bagi PNS.



Diprediksi, pada tahun 2024, PNS sudah bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan teknologi digital karena diasumsikan 50% PNS telah menguasai teknologi informasi/digital. Absensi bisa dilakukan dari mana saja, rapat dilakukan secara *video conference* dan penggunaan *cloud computing* atau penggunaan aplikasi kantor secara bersamaan yang dapat diakses oleh PNS dari mana saja. Selain itu, penggunaan email, aplikasi media sosial secara grup, dan aplikasi yang *paperless* (tanpa kertas) sudah menjadi kegiatan sehari-hari.

Pernyataan Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Muhammad Ridwan, dalam keterangan pada awak media mengatakan bahwa terjadinya pergeseran pekerjaan yang terjadi saat ini di pemerintahan melatarbelakangi munculnya wacana *Flexible Working Arrangement*. Namun masih dibutuhkan persiapan yang sangat panjang, seperti peraturan, kematangan aplikasi *virtual office*, kejelasan target, hingga *Standard Operating Procedure (SOP)*. Lebih jauh, Ridwan mengatakan bahwa untuk mewujudkan hal ini maka masih diperlukan adanya kematangan regulasi, infrastruktur, suprastruktur, dan keberterimaan masyarakat (<https://www.bkn.go.id>).

Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 67 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru mengatur tentang sistem kerja baru bagi PNS dengan memperhatikan jumlah PNS yang melakukan aktifitas kerja di kantor dan yang melakukan aktifitas kerja dari rumah berdasarkan data zonasi resiko penyebaran covid-19 (tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi) dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Surat Edaran MenPAN-RB tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 800/6445/SET Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalam Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Diharapkan, PNS Pemerintah Provinsi Papua yang melakukan aktifitas kerja dari rumah tetap bisa mempertahankan produktivitasnya karena dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan dalam bekerja. Namun demikian, tidak semua PNS diijinkan untuk bekerja dari rumah.

Seiring dengan semakin meningkatnya penyebaran virus covid-19, maka keadaan *force majeure* pun sedang terjadi. WFH yang tadinya berupa wacana, kini diberlakukan dan PNS dapat bekerja dari rumah. Walaupun masih banyak instansi Pemerintah dan PNS yang belum siap, namun keadaan saat ini memaksa kita untuk bersikap dan bertindak dinamis mengikuti perubahan keadaan. Semua harus segera dirumuskan, disusun mekanisme penyelenggaraan WFH, SOP, target dan outputnya karena penyelenggaraan pemerintahan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya meskipun PNS harus bekerja dari rumah.

Akhirnya, diharapkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat beradaptasi dengan budaya baru dalam bekerja di tengah situasi pandemi covid-19 ini. Hal ini menjadi penting agar tugas utama kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tetap dapat diemban dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab. (*) (FG)



SERBA - SERBI



Rakor Online SIPD Provinsi Papua Tahun 2020



Sertijab Pejabat Eseleon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Bappeda Provinsi Papua



Workshop Pengenalan Model Pembangunan Berbasis Sistem dalam Menyusun Rencana Sektoral Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua



Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021



Rapat bersama Anggota DPRP Komisi III Bidang Keuangan dan Aset Daerah



Kick Off PON 362 Hari Menjelang dimulainya PON XX Papua Tahun 2021



Koordinasi dengan BPS Papua terkait Rencana Aksi Perubahan Papua *Integrated* Satu Data



Webinar Forum KTI: Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

“
TERKADANG,
KESULITAN HARUS KAMU RASAKAN TERLEBIH DULU
SEBELUM KEBAHAGIAAN YANG SEMPURNA
DATANG KEPADAMU.
”

R. A. Kartini

“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. ”

B.J. Habibie

**BULETIN BAPPEDA
PROVINSI PAPUA
EDISI 2 TAHUN 2020**